

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kedungrawan - Krembung

Oleh :

Rika Rikhmaia Putri
192020100055

Dosen Pembimbing :
Isna Fitria Agustina, S.AP., M.AP

Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
September, 2025



Pendahuluan

Kemiskinan

Indonesia adalah Negara yang masih menghadapi problem kemiskinan akut. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang sudah melampaui usia lebih dari 7 (tujuh) dekade semenjak kemerdekaan masih dihadapi dengan masalah kemiskinan. Data yang di proleh dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2022 tercatat sebanyak 9,54% penduduk miskin di Indonesia. Artinya masih ada sekitar 26,16 juta masyarakat Indonesia yang hidup digaris kemiskinan.

BPNT

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah jenis bantuan pangan sosial berbasis sistem uang elektronik bulanan yang ditawarkan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).



Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada masyarakat miskin, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), setiap bulannya. KPM adalah mereka yang berada dalam 25% terbawah dari tingkat sosial ekonomi di daerah pelaksanaan program. Tujuan utama dari program BPNT adalah untuk membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan gizi, kebutuhan pokok sehari-hari, serta memastikan ketepatan waktu dan sasaran penerima bantuan.

Pendahuluan

E-warong merupakan agen bank atau pedagang yang telah bekerja sama dengan bank penyalur yang ditetapkan sebagai tempat di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menarik atau membeli bahan pokok bantuan sosial. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan senilai 110.000 rupiah per bulan.



Dukungan dari berbagai sumber diperlukan untuk menjamin efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Salah satunya adalah melalui pengawasan bersama terhadap struktur birokrasi dalam proses penyaluran BPNT. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran kita semua dalam melakukan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh instansi terkait

Tabel 2. Jumlah penduduk miskin dan jumlah penerima bantuan (KPM) Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Bantuan	Tahun
2021	432 Orang	136 Orang	2021
2022	560 Orang	389 Orang	2022
2023	496 Orang	259 Orang	2023

Sumber : diolah oleh Pemerintah Desa, 2024

Permasalahan Dalam Implementasi Program BPNT Di Desa Kedungrawan - Krembung



1

Terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan

2

Penyaluran bantuan tidak tepat sasaran

3

Kurangnya sosialisasi tentang program BPNT terhadap masyarakat desa .

PENELITIAN TERDAHULU

Eko Yudianto Yunus,
2019

“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan program BPNT belum sepenuhnya terpenuhi, terutama yang berkaitan dengan akurasi target dan penerimaan BPNT untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu tantangan yang dihadapi dalam sosialisasi program BPNT adalah banyaknya masyarakat yang masih minim literasi dan pendidikan.

Dionita Putri Anwar,
2020

“Implementasi Program bantuan pangan NonTunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan masalah serius dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sisir. Inisiatif BPNT dinilai berhasil karena kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang efisien dan efektif di Desa Sisir.

Eka Wahyuning Dyas, Isna Fitria Agustina, 2023

“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu Kurang teliti dalam melakukan pendataan, Data yang lama masih belum diperbarui. Masih adanya KPM yang seharusnya sudah lolos dari syarat PKH tetapi masih terdata.



METODE PENELITIAN



Jenis Penelitian

Menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif.



Teknik Penganalisisan Data

Menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Lokasi Penelitian

Desa Kedungrawan kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.



Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan teori dari Edward III. yang terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.



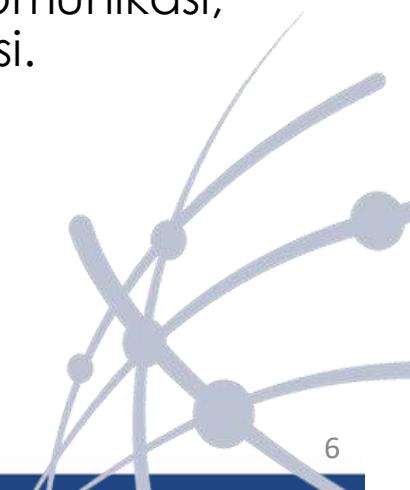
Teknik Penentuan Informan

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi.



Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan teknik *purposive sampling*

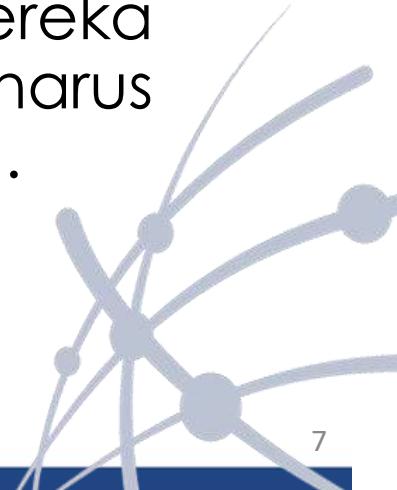


Hasil Dan Pembahasan

Komunikasi

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan bisa dipengaruhi oleh aspek komunikasi. Keberhasilan implementasi dianggap efektif ketika para pembuat kebijakan memahami langkah-langkah yang diperlukan. proses komunikasi yang berbeda dapat timbul dari berbagai sumber informasi yang beragam.

Untuk memastikan efektivitasnya implementasi, penting bagi para pelaksana keputusan untuk memahami apakah mereka mampu menjalankannya.. Komunikasi yang disampaikan harus jelas dan tidak membingungkan para pelaksana kebijakan.



Hasil Dan Pembahasan



Sosialisasi Program BPNT

Sumber : dokumen peneliti, 2025

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan dalam hal komunikasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kedungrawan, para petugas sudah konsisten dalam memberikan informasi terkait pencairan dana kepada KPM. Namun juga ditemukan permasalahan yaitu tanggal pencairan dana tidak menentu dan kadang sampai terlambat penyalurannya.

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa kedungrawan sudah melaksanakan komunikasi dengan cara melakukan sosialisasi. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi dapat berjalan efektif apabila tujuan kebijakan dapat dipahami oleh tiap-tiap individu yang bertanggungjawab dalam suatu kebijakan.

Hasil Dan Pembahasan

Sumber Daya

Goerge C Edwards III (1980) menyatakan bahwa sumber daya merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Di dalam implementasi, sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas fisik.

Dalam pelaksanaan kebijakan, diperlukan beberapa jenis sumber daya, yaitu sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas. Di antara ketiga sumber daya ini, sumber daya manusia menjadi yang paling krusial karena tanpa kehadiran manusia, sumber daya lainnya tidak dapat diakses. Namun, penting juga bahwa sumber daya manusia yang tersedia mencukupi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan.

Hasil Dan Pembahasan

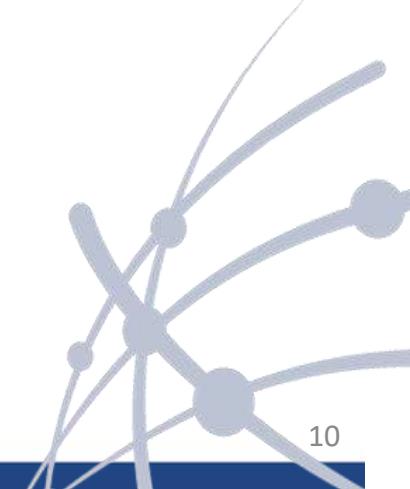
Jumlah Alokasi Anggaran dan Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Penerima (KPM)	Jumlah Alokasi Dana
2021	136 Orang	27,2 Juta
2022	389 Orang	77,8 Juta
2023	259 Orang	51,8 Juta

Sumber : diolah oleh Pemerintah Desa, 2024

Sarana dan prasarana juga merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan. Sarana merupakan peralatan yang bergerak dan bisa dipakai secara langsung seperti komputer, buku, pulpen, kipas angin dan lain-lain. Prasarana merupakan fasilitas umum sebagai penunjang dan tidak bisa dipindah-pindah misalnya kantor, gedung, kelas, ruangan dan lain-lain.

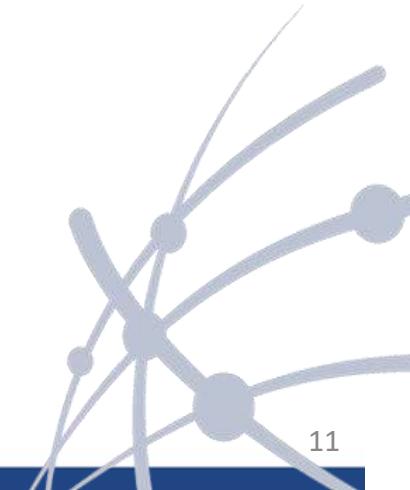
Dalam proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sumber Daya (SD) merupakan subjek dari proses implementasi ini. Fasilitas atau alat yang digunakan e-warung berupa kartu kombo (KKS dan kartu ATM) dan mesin EDC.



Hasil Dan Pembahasan

Disposition

Menurut Goerge C Edwards III (1980), Disposisi adalah sikap atau kemauan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Selain memahami langkah-langkah yang perlu diambil pelaksana kebijakan diharapkan memiliki sikap dan keterampilan yang sesuai. Ini penting agar pelaksanaan di lapangan dapat dilakukan tanpa adanya prasangka atau bias yang tidak diinginkan.



Hasil Dan Pembahasan



Pegawai pengurus program BPNT dan Penerima KPM

Sumber : dokumen peneliti, 2025

Sikap para pelaksana program di Desa Kedungrawan mendukung penuh adanya program bantuan pangan non tunai dan melaksanakan program tersebut dengan baik.

Dan Keluarga Penerima Manfaat BPNT di Desa Kedungrawan merasa senang dengan adanya bantuan sehingga manfaat dari bantuan dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi juga masih ditemukan sebagian KPM yang tidak melaksanakan perintah dan menganggap bantuan pemerintah ini bebas digunakan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Akibatnya, kurangnya kesadaran diri dari masyarakat sehingga masih ditemukan beberapa KPM lain yang menyalahgunakan bantuan tersebut digunakan untuk tujuan selain kebutuhan pendidikan dan kesehatan dll.

Hasil Dan Pembahasan

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu organisasi yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus bisa mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi dengan baik.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana program sudah melaksanakan SOP. Dalam menjalankan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kedungrawan sudah melaksanakan program sesuai dengan SOP yang ditetapkan pemerintah. Untuk pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kedungrawan para pelaksana program sudah melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tidak mengalami tumpang tindih dalam pelaksanaan. Namun sesuai kenyataannya masih terdapat kejanggalan yaitu penyalurannya yang masih kurang merata, yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak terdaftar untuk mendapat bantuan BPNT.



Kesimpulan

Kesimpulan dari rumusan masalah pertama dapat dilihat dari indikator yaitu Komunikasi antar pelaksana program dalam transmisi Desa Kedungrawan sudah mengadakan kegiatan sosialisasi dengan mengundang KPM ke balai desa, Para pelaksana juga sudah konsisten dalam memberikan informasi terkait program BPNT kepada KPM. Sumber Daya manusia, dalam program Bantuan Pangan Non Tunai petugasnya ada 2, Petugas sudah ahli dan berpengalaman dalam menjalankan program BPNT dan sudah dibekali dengan pelatihan. Terkait informasi sudah ada dalam pedoman umum pelaksanaan BPNT. Sumber dana program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 200.000/bulan.

Disposisi, di Desa Kedungrawan sudah mendukung dengan adanya program bantuan pangan non tunai dan berkomitmen untuk melaksanakan program sesuai dengan aturan prosedur. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan BPNT yaitu kurangnya ketepatan sasaran penerima bantuan saldo nol di rekening KPM, dan masih terdapat rumah tangga yang tergolong kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT, akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BPNT, Struktur Birokrasi, SOP dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai telah di terapkan di Desa Kedungrawan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. KPM mengalami saldo nol di rekening, yang disebabkan oleh status kepesertaan KPM di program bantuan sosial dihapus oleh Kementerian Sosial dan ada kendala pada data KPM yang disebabkan oleh kesalahan entri pada nomer NIK pada KK ataupun NIK pada KTP.



Referensi

- H. Husna Et Al., "Implementasi Program Sembako Di Kelurahan Alalak Utara," Jpp (Jurnal Adm. Publik Dan Pembangunan), Vol. 3, No. 1, Pp. 57-63, 2021.
- R. Djaenal, J. E. Kagwoan, And R. Ismail, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore," J. Gov., Vol. 1, No. 2, Pp. 1-11, 2021.
- K. Khasanah, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal," 2020.
- Syafruddin, M. Ikbal, And A. Kalrah, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang," Jia, Vol. 9, No. 2, Pp. 104-110, 2021.
- E. Y. Yunus, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo," Reformasi, Vol. 9, No. 2, Pp. 138-152, 2019.
1. Fadlurrohim, S. A. Nulhaqim, And S. Sulastri, "Implementasi Program Bantuan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)," Soc. Work J., Vol. 9, No. 2, Pp. 122-129, 2020, Doi: 10.24198/Share.V9i2.20326.
- K. Nabila, P. Suharso, And W. Hartanto, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember," J. Pendidik. Ekon. J. Ilm. Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekon. Dan Ilmu Sos., Vol. 15, No. 2, Pp. 303-309, 2021.
- D. P. Anwar, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu," 2020.
- I. F. A. Eka Wahyuning Dyas, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," pp. 1-13, 2023.
- D. K. D. I. K. Sidoarjo, "Analisa Distribusi Dan Pemanfaatan Data Bantuan Sosial Tingkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022," 2022.
- T. A. Sigit, "Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia," J. Perbendaharaan, Keuang. Negara Dan Kebijak. Publik, Vol. 5, No. 2, Pp. 105-119, 2020.
- A. N. Sari, "Implementasi Program Batuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Studi Di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka," Pp. 1-12, 2020.
- E. Y. Ristanti And K. Fadhli, "Analisis Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," Jpekbm (Jurnal Pendidik. Ekon. Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen), Vol. 6, No. 2, Pp. 21-27, 2022.
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) . Jurnal Respon Publik, 1-7.
- Adrus Meliala.(2012). Masalah Kemiskinan Dan Kejahatan Serta Respon Kebijakan Publik Dalam Rangka Mengatasinya. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi 8*, Hlm 11.
- Salmida. (2020). Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera.
- Balqis, A. S., Iskatrinah, & Hariadi, W. (2020). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) . Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.

